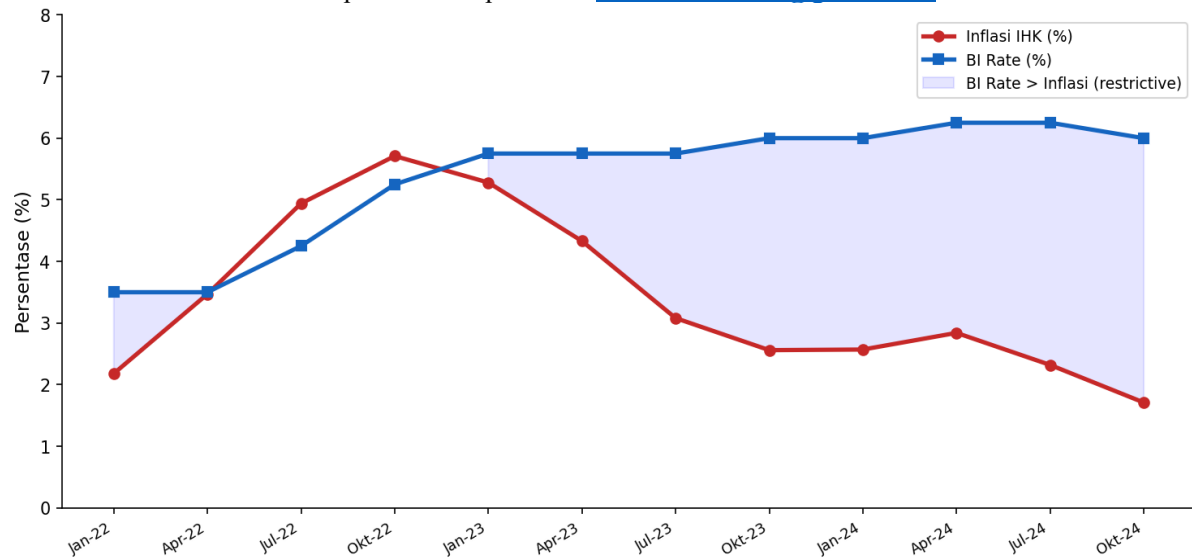


## Dampak Konflik Geopolitik Global Terhadap Inflasi Indonesia Tahun 2022–2024: Analisis Jalur Transmisi Energi, Pangan, Dan Rantai Pasok

Mica Siar Meiriza, Shintami Oktavia, Geby Yola Berlian Nainggolan, Rahma Dea Sapitri, Maika Titi Musliha, Karan Rayhan Almunawi, Rivaldo Setiawan Silitonga, Erwin Purba, Aura Puteri Ginting, Erlina Victoria Simanungkalit

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan, Indonesia  
Email penulis korespondensi: [micasiar.meiriza@gmail.com](mailto:micasiar.meiriza@gmail.com)



### Article Info

Submitted: 2026-05-25  
Revised: 2026-06-03  
Accepted: 2026-06-25



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### Publisher

Universitas Negeri Medan

### ABSTRACT

This study analyzes the impact of global geopolitical conflicts, particularly the 2022 Russia-Ukraine War, on inflation in Indonesia during the 2022–2024 period using a qualitative-descriptive-analytical approach. Three main transmission channels were identified as operating simultaneously: energy price shocks that drove energy inflation up to 13.9%, global food supply disruptions that caused food inflation to reach 8.01% with a lag of three to six months, and supply chain disruptions that increased logistics and industrial raw material costs. These three channels drove Indonesia’s annual inflation to a peak of 5.95% in September 2022—the highest in a decade—but it was successfully brought down to 2.51% by 2024 through a combination of a cumulative 225-basis-point increase in the BI Rate and protective fiscal policies, including energy subsidies of Rp 502 trillion and targeted social assistance. This cost-push inflation had a regressive impact on low-income households, although social protection programs succeeded in reducing the poverty rate from 9.54% to 9.03%. This study highlights Indonesia’s structural vulnerability as a net importer of commodities, as well as the urgency of import diversification and long-term energy and food security.

**Keywords:** geopolitical conflict, inflation, cost-push inflation, import inflation, global supply chains, monetary policy, Indonesia.

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak konflik geopolitik global, khususnya Perang Rusia-Ukraina 2022, terhadap inflasi di Indonesia selama periode 2022–2024 dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif-analitis. Tiga saluran

transmisi utama diidentifikasi beroperasi secara bersamaan: guncangan harga energi yang mendorong inflasi energi hingga 13,9%, gangguan pasokan pangan global yang menyebabkan inflasi pangan mencapai 8,01% dengan jeda tiga hingga enam bulan, serta gangguan rantai pasokan yang meningkatkan biaya logistik dan bahan baku industri. Ketiga saluran ini mendorong inflasi tahunan Indonesia mencapai puncak 5,95% pada September 2022—tertinggi dalam satu dekade—namun berhasil ditekan menjadi 2,51% pada 2024 melalui kombinasi kenaikan kumulatif 225 bps pada Suku Bunga BI dan kebijakan fiskal protektif, termasuk subsidi energi sebesar Rp 502 triliun dan bantuan sosial yang ditargetkan. Inflasi dorongan biaya ini berdampak regresif terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah, meskipun program perlindungan sosial berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,54% menjadi 9,03%. Studi ini menyoroti kerentanan struktural Indonesia sebagai negara pengimpor bersih komoditas serta urgensi diversifikasi impor serta keamanan energi dan pangan jangka panjang.

**Kata Kunci:** konflik geopolitik, inflasi, inflasi biaya, inflasi impor, rantai pasokan global, kebijakan moneter, Indonesia.

©2026; *How to Cite:* Dampak Konflik Geopolitik Global terhadap Inflasi Indonesia Tahun 2022–2024: Analisis Jalur Transmisi Energi, Pangan, dan Rantai Pasok (M. S. Meiriza, A. P. Ginting, E. Purba, R. S. Silitonga, K. R. Almunawi, M. T. Musliha, R. D. Sapitri, G. Y. B. Nainggolan, S. Oktavia, & E. V. Simanungkalit, Trans.). (2026). *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 24(1), 149-161.

## PENDAHULUAN

Dunia telah menyaksikan perubahan dramatis dalam lanskap geopolitik sejak awal 2022. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 merupakan peristiwa geopolitik paling signifikan sejak Perang Dingin, yang mengguncang pasar komoditas global dan memperparah tekanan inflasi yang sebelumnya sudah meningkat akibat pemulihan ekonomi pasca-COVID-19. Konflik ini tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga telah menyebar ke seluruh dunia melalui jaringan perdagangan dan keuangan global.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbuka yang bergantung pada impor energi dan pangan, tidak luput dari dampak tersebut. Tingkat inflasi Indonesia, yang sebelumnya relatif terkendali di kisaran 1,5–2,5%, mulai melonjak drastis sepanjang tahun 2022, mencapai puncaknya sebesar 5,95% pada September 2022—tertinggi dalam satu dekade terakhir (BPS, 2023). Kenaikan ini terjadi di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi, sehingga

menciptakan tekanan ganda yang mempersulit pengelolaan kebijakan ekonomi.

Dapat diidentifikasi dua saluran transmisi utama: pertama, lonjakan harga energi internasional akibat sanksi terhadap Rusia, eksportir minyak dan gas terbesar di dunia; kedua, gangguan pada pasokan pangan global, terutama untuk gandum dan minyak nabati, mengingat Rusia dan Ukraina bersama-sama menyumbang sekitar 30% dari ekspor gandum global (FAO, 2022). Selain itu, konflik tersebut telah memperparah gangguan pada rantai pasokan yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan pandemi, sehingga menyebabkan kenaikan signifikan pada biaya logistik dan bahan baku.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dampak konflik geopolitik global terhadap inflasi di Indonesia pada periode 2022 hingga 2024; (2) menelaah dampak kenaikan harga energi, pangan, dan bahan baku global; (3) menganalisis gangguan pada rantai pasokan global; (4) mengevaluasi respons kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia; (5) menganalisis dampak inflasi

terhadap daya beli rumah tangga; dan (6) memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kondisi geopolitik internasional dan perubahan inflasi domestik Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kompleksitas fenomena yang diteliti: dampak konflik geopolitik terhadap inflasi melibatkan interaksi antara variabel ekonomi, kebijakan, dan konteks global yang tidak dapat sepenuhnya diukur secara kuantitatif tanpa mengabaikan nuansa-nuansa penting. Penelitian kualitatif memungkinkan dilakukannya analisis mendalam terhadap mekanisme transmisi dan hubungan sebab-akibat yang berlapis-lapis (Creswell & Poth, 2018).

**3.2 Sumber dan Pengumpulan Data**

Data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka sistematis. Sumber-sumber utamanya meliputi: (1) Laporan Kebijakan Moneter dan Tinjauan Ekonomi Regional Bank Indonesia (BI) (2022–2024); (2) data inflasi IHK dan publikasi statistik harga BPS; (3) World Economic Outlook IMF (2022–2024); (4) World Bank’s Commodity Markets Outlook; (5) laporan FAO mengenai pasar pangan global; (6) jurnal ilmiah yang terindeks di Scopus dan SINTA (2019–2024); dan (7) publikasi resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Periode penelitian mencakup Januari 2022 hingga Desember 2024, dengan titik referensi historis dimulai pada tahun 2020 untuk memahami konteks pasca-pandemi. Periode ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan konflik Rusia-Ukraina (yang dimulai pada Februari 2022) dan konflik Timur Tengah, yang semakin memanas pada tahun 2023–2024.

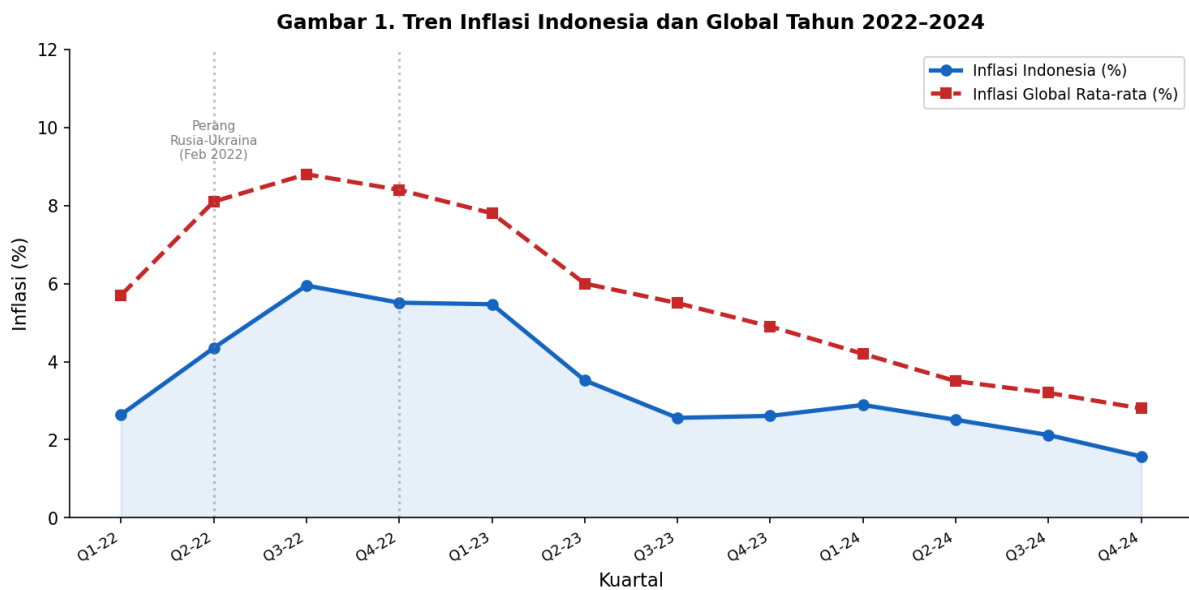
**HASIL**

**4.1 Dinamika Inflasi Indonesia 2022–2024**

*Tabel 1. Data Inflasi Indonesia dan BI Rate Tahun 2022–2024*

Tahun/Periode	Inflasi Tahunan (%)	Inflasi Pangan (%)	Inflasi Energi (%)	BI Rate (%)
2022 (rata-rata)	5.51	8.01	13.9	4.25→5.25
2023 (rata-rata)	3.61	5.83	4.24	5.75→6.00
2024 (rata-rata)	2.51	3.23	2.62	6.00→6.25
Target BI 2022	2.0–4.0	-	-	-
Target BI 2023-24	1.5–3.5	-	-	-

Sumber: Bank Indonesia dan BPS (2022–2024), diolah penulis



**Gambar 1. Tren Inflasi Indonesia dan Global Tahun 2022–2024**

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat inflasi tahunan Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dan bertahap sepanjang periode studi, turun dari 5,51% pada tahun 2022 menjadi 3,61% pada tahun 2023, dan terus melambat menjadi 2,51% pada tahun 2024. Inflasi pangan, yang awalnya berada di level 8,01% pada tahun 2022, juga berhasil diturunkan menjadi 3,23% pada tahun 2024, begitu pula dengan inflasi energi, yang turun tajam dari 13,9% menjadi hanya 2,62% selama periode yang sama. Tren penurunan ini tergambar dengan jelas pada Gambar 1, di mana garis inflasi Indonesia menunjukkan kurva yang terus menurun sejak puncaknya pada kuartal II–III 2022, meskipun mengalami sedikit fluktuasi pada kuartal-kuartal tertentu.

Jika dibandingkan dengan kondisi global, Gambar 1 menunjukkan selisih yang cukup mencolok antara tingkat inflasi Indonesia dan rata-rata tingkat inflasi global sepanjang periode 2022–2024. Pada kuartal ketiga tahun 2022, rata-rata inflasi global mencapai puncaknya di sekitar 8,8%, sementara Indonesia hanya mencatat 5,95% selama

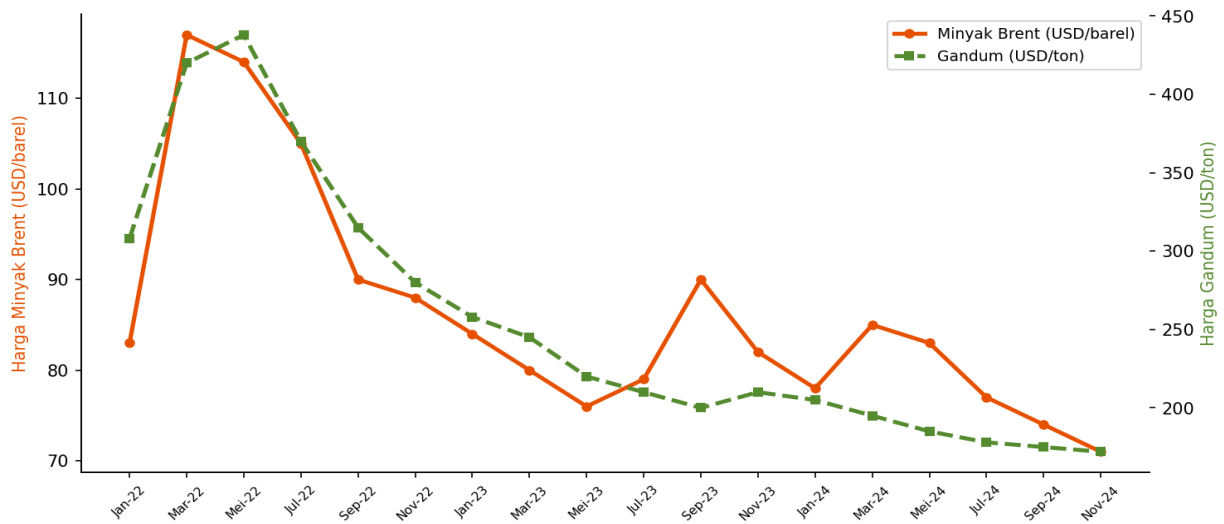
periode yang sama. Kesenjangan ini bukan berarti bahwa Indonesia tidak terpengaruh oleh guncangan eksternal seperti konflik Rusia-Ukraina, yang memicu lonjakan harga energi dan pangan global; melainkan, hal ini mencerminkan keefektifan bauran kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi subsidi bahan bakar yang besar-besaran, penetapan harga eceran tertinggi untuk komoditas pangan strategis seperti minyak goreng dan beras, serta pengetatan moneter secara bertahap melalui kenaikan Suku Bunga BI dari sekitar 4,25% pada awal 2022 menjadi 6,25% pada 2024.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah kecepatan pemulihan inflasi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Sementara banyak negara maju, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, masih berjuang untuk menurunkan inflasi ke tingkat normal pada akhir 2024, Indonesia telah berhasil kembali ke kisaran target Bank Indonesia sebesar 1,5–3,5% sejak pertengahan 2023. Pencapaian ini cukup luar biasa

mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang umumnya lebih rentan terhadap tekanan inflasi eksternal karena ketergantungan pada impor dan volatilitas nilai tukar. Keberhasilan ini memperkuat argumen bahwa tekanan inflasi yang dialami Indonesia selama periode 2022–2024 terutama berasal dari eksternal dan didorong

oleh pasokan (inflasi cost-push), bukan struktural dan didorong oleh permintaan (inflasi demand-pull). Akibatnya, respons kebijakan yang terarah dan terkoordinasi antara otoritas fiskal dan moneter mampu menghasilkan hasil yang relatif cepat, efektif, dan terukur.

#### 4.2 Jalur Transmisi I: Guncangan Harga Energi



Gambar 2. Perkembangan Harga Minyak dan Gandum Global (2022–2024)

Pada awal tahun 2022, harga minyak Brent meloncat drastis dari sekitar USD 83 per barel hingga mencapai rentang USD 117–120 per barel pada bulan Maret hingga Juni 2022. Kenaikan harga minyak Brent ini disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengganggu pasokan energi global serta kebijakan embargo energi Rusia yang diterapkan oleh negara-negara Barat.

Sementara itu, harga gandum global juga mengalami kenaikan signifikan, mendekati USD 438 per ton pada Mei 2022 karena terhambatnya ekspor pangan dari wilayah Laut Hitam. Kenaikan harga gandum ini berdampak pada Indonesia, karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor gandum, terutama untuk kebutuhan industri tepung terigu, mie instan, roti, dan pakan hewan.

Kenaikan harga energi di seluruh dunia memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dalam negeri Indonesia. Kenaikan harga minyak global yang terus berlanjut mengakibatkan beban subsidi energi pemerintah semakin berat. Dalam situasi ini, pemerintah akhirnya menyesuaikan harga BBM pada September 2022, termasuk peningkatan harga Pertalite dan Pertamax. Kebijakan penyesuaian harga BBM ini secara langsung mempengaruhi inflasi, terutama lewat kenaikan biaya angkutan dan distribusi barang.

Selain pengaruh langsung, peningkatan harga energi juga menimbulkan efek lanjutan pada sektor industri. Hampir semua sektor ekonomi memanfaatkan energi sebagai input utama, sehingga kenaikan harga BBM mendorong kenaikan biaya operasional bagi industri,

logistik, dan aktivitas distribusi. Akibatnya, pelaku usaha cenderung meningkatkan harga jual produk dan layanan untuk mengimbangi lonjakan biaya produksi itu. Kenaikan harga gandum dunia juga menambah tekanan terhadap inflasi pangan dalam negeri. Saat harga gandum global naik, biaya produksi sektor pangan lokal juga mengalami peningkatan. Situasi ini lalu memicu peningkatan harga beragam produk makanan olahan di pasar lokal.

Oleh karena itu, fluktuasi harga minyak dan gandum dunia selama 2022–2024 menunjukkan bahwa pertikaian geopolitik global dapat berdampak pada inflasi Indonesia melalui saluran energi dan makanan. Efeknya tidak hanya terlihat dari kenaikan harga komoditas secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan biaya produksi, distribusi, serta harga barang yang dikonsumsi masyarakat.

#### **4.3 Jalur Transmisi II: Guncangan Harga Pangan Global**

Rusia dan Ukraina secara bersama-sama menyuplai sekitar 30% ekspor gandum global dan 65% ekspor minyak bunga matahari (FAO, 2022). Gangguan ekspor dari kedua negara ini menyebabkan harga gandum di pasar internasional melonjak dari sekitar USD 308/ton pada Januari 2022 ke puncaknya USD 438/ton pada Mei 2022 — kenaikan 42% dalam empat bulan.

Indonesia, dengan ketergantungan impor gandum yang sangat tinggi (sekitar 10 juta ton per tahun untuk industri mie instan, roti, dan pakan ternak), merasakan langsung dampak lonjakan harga ini. Komponen pangan dalam IHK Indonesia mencatat inflasi sebesar 8,01% rata-rata sepanjang 2022, jauh di atas inflasi headline. Produk berbasis gandum seperti mie kering, roti, dan biskuit mencatat kenaikan

harga yang signifikan, yang berdampak besar pada pengeluaran rumah tangga mengingat produk-produk ini merupakan komponen penting konsumsi masyarakat kelas menengah-bawah.

Yang patut dicatat adalah bahwa efek transmisi dari harga pangan global ke inflasi domestik Indonesia tidak bersifat instan. Terdapat jeda waktu antara tiga hingga enam bulan, konsisten dengan temuan Surjaningsih et al. (2023), karena adanya stok buffer, kontrak pembelian jangka menengah, dan mekanisme penetapan harga di tingkat produsen. Hal ini menjelaskan mengapa inflasi Indonesia terus meningkat hingga Q3 2022 meskipun harga gandum internasional sudah mulai turun dari puncaknya sejak Juli 2022.

#### *Dinamika Transmisi Harga Pangan dalam Perspektif 2022–2024*

Dalam perspektif jangka menengah 2022–2024, konflik Rusia–Ukraina yang tidak kunjung mereda menciptakan ketidakpastian pasokan yang bersifat persisten, sehingga tekanan inflasi pangan Indonesia tidak semata-mata bersumber dari lonjakan harga tunggal, melainkan dari volatilitas harga komoditas yang berkepanjangan.

Memasuki 2023, tekanan inflasi pangan bersumber dari dua faktor tambahan yang saling memperparah. Pertama, depresiasi Rupiah akibat pengetatan moneter global menyebabkan harga impor dalam denominasi Rupiah tetap tinggi meskipun harga komoditas global dalam USD mulai melandai — menunjukkan bahwa jalur pangan dan jalur nilai tukar bekerja secara simultan. Kedua, gangguan pasokan pupuk global akibat sanksi terhadap Rusia turut menekan produktivitas pertanian domestik, menambah tekanan pada harga pangan lokal.

Pemerintah merespons melalui operasi pasar, relaksasi impor, dan penguatan cadangan Bulog, namun efektivitasnya terbatas mengingat akar persoalan bersifat eksternal. Kondisi ini menegaskan kerentanan struktural Indonesia sebagai net importer pangan strategis dan menggarisbawahi urgensi diversifikasi sumber impor serta akselerasi ketahanan pangan domestik sebagai agenda kebijakan jangka panjang.

#### 4.4 Jalur Transmisi III: Gangguan Rantai Pasok Global

Konflik geopolitik global tidak hanya memengaruhi harga energi dan pangan, tetapi juga memperburuk gangguan rantai pasok global yang sebelumnya telah melemah akibat pandemi COVID-19. Rantai pasok global merupakan sistem distribusi internasional yang menghubungkan proses produksi, pengiriman, dan perdagangan antarnegara. Ketika terjadi konflik geopolitik, jalur perdagangan dapat terganggu, biaya logistik meningkat, dan distribusi barang menjadi lebih lambat.

Perang Rusia-Ukraina menyebabkan sejumlah jalur perdagangan internasional terganggu, terutama di kawasan Eropa dan Laut Hitam. Sanksi ekonomi terhadap Rusia juga membatasi aktivitas perdagangan internasional dan memperpanjang waktu pengiriman barang. Dalam situasi tersebut, biaya pengiriman peti kemas global tetap tinggi meskipun mulai menurun dari puncak pandemi. Banyak perusahaan harus menanggung biaya logistik yang lebih mahal dan menghadapi ketidakpastian distribusi.

Indonesia ikut merasakan dampaknya melalui beberapa sektor penting.

##### a. Kenaikan Biaya Impor Bahan Baku

Banyak industri manufaktur Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku dari luar negeri. Gangguan distribusi global

menyebabkan biaya impor meningkat dan waktu pengiriman menjadi lebih lama. Industri otomotif, tekstil, elektronik, dan kimia mengalami kesulitan memperoleh bahan baku secara stabil. Akibatnya, biaya produksi meningkat dan harga produk akhir cenderung naik.

##### b. Peningkatan Biaya Logistik Domestik

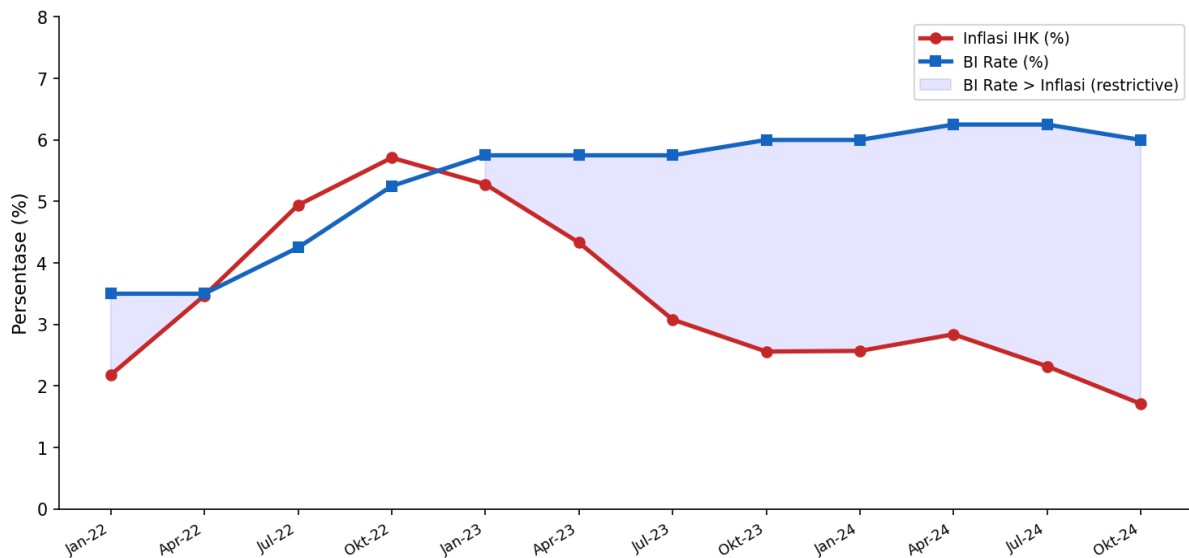
Kenaikan biaya pengiriman internasional turut memengaruhi biaya logistik domestik. Distribusi barang antarwilayah di Indonesia menjadi lebih mahal, terutama karena tingginya harga BBM dan keterbatasan pasokan kontainer. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga barang konsumsi di berbagai daerah, terutama wilayah yang bergantung pada distribusi dari pusat produksi utama.

##### c. Ketidakpastian Produksi dan Investasi

Gangguan rantai pasok global juga menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Banyak perusahaan mengalami kesulitan melakukan perencanaan produksi karena fluktuasi harga bahan baku dan keterlambatan pasokan. Ketidakpastian tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha menahan ekspansi investasi dan lebih berhati-hati dalam aktivitas produksi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Fenomena gangguan rantai pasok menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi antarnegara. Ketika terjadi konflik geopolitik di satu kawasan, dampaknya dapat menyebar luas hingga memengaruhi negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi pelajaran penting mengenai perlunya penguatan industri domestik dan diversifikasi sumber impor agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

#### 4.5 Respons Kebijakan: Bank Indonesia dan Pemerintah



**Gambar 3. Respons BI Rate terhadap Dinamika Inflasi Indonesia (2022–2024)**

Gambar 5 menggambarkan dinamika antara kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dan tingkat inflasi sepanjang periode 2022–2024. Dari grafik tersebut, setidaknya tiga fase kebijakan yang berbeda dapat diidentifikasi dengan jelas, dan setiap fase mencerminkan bagaimana BI menilai situasi pada titik-titik waktu yang berbeda.

Fase pertama berlangsung dari Januari hingga Juli 2022 dan dapat digambarkan sebagai fase “menunggu dan melihat”. Selama periode ini, BI mempertahankan BI Rate pada 3,50%, tingkat yang sama seperti selama pandemi, meskipun data inflasi telah mulai menunjukkan tren kenaikan. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Pemulihan ekonomi Indonesia pasca-COVID-19 masih berlangsung lambat, tingkat pengangguran belum sepenuhnya pulih, dan ada kekhawatiran bahwa menaikkan suku bunga terlalu dini justru dapat meredam konsumsi rumah tangga dan investasi yang baru saja mulai meningkat. Pada saat itu, BI masih menilai bahwa tekanan inflasi bersifat sementara artinya tekanan tersebut akan mereda dengan sendirinya seiring normalnya rantai pasokan global. Pandangan ini sejalan

dengan sikap awal banyak bank sentral besar di seluruh dunia, termasuk The Fed, yang juga mempertahankan suku bunga rendah lebih lama dari yang diperkirakan pasar (IMF, 2022).

Namun, asumsi bahwa inflasi akan mereda dengan sendirinya ternyata keliru. Pada pertengahan 2022, konflik Rusia-Ukraina tak menunjukkan tanda-tanda mereda, harga energi dan pangan global tetap tinggi, dan inflasi Indonesia terus merangkak naik mendekati 5%. Pada titik inilah BI melakukan perubahan kebijakan yang signifikan. Fase kedua dimulai pada Agustus 2022 dengan kenaikan suku bunga BI pertama sebesar 25 bps, diikuti oleh serangkaian kenaikan yang lebih agresif sehingga selama periode tujuh bulan, dari Agustus 2022 hingga Januari 2023 suku bunga BI naik total 225 bps dari 3,50% menjadi 5,75%. Hal ini merupakan salah satu siklus pengetatan moneter tercepat yang pernah dilakukan BI sejak era reformasi (Bank Indonesia, 2023).

Kenaikan suku bunga BI yang agresif ini memiliki dua tujuan utama yang saling terkait. Pertama, untuk menekan permintaan domestik

agar tidak semakin memperburuk inflasi sisi permintaan. Ketika suku bunga naik, kredit menjadi lebih mahal, konsumsi yang didorong utang melambat, dan tekanan harga dari sisi permintaan berkurang. Kedua, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ketika The Fed secara agresif menaikkan suku bunga sepanjang tahun 2022, selisih imbal hasil antara aset yang dinominasikan dalam dolar AS dan aset yang dinominasikan dalam rupiah menyempit, yang mendorong arus keluar modal dan melemahnya rupiah. Rupiah yang melemah secara langsung memperburuk inflasi impor karena biaya impor barang-barang kebutuhan pokok dan bahan baku industri meningkat. Dengan menaikkan Suku Bunga BI, Bank Indonesia memperlebar selisih imbal hasil ini agar investasi portofolio asing tidak mengalir keluar dari Indonesia dalam skala besar (Bank Indonesia, 2022).

Fase ketiga, yang berlangsung dari tahun 2023 hingga akhir tahun 2024, adalah fase konsolidasi. BI mempertahankan BI Rate dalam kisaran 6,00–6,25% selama beberapa kuartal, menahan diri untuk tidak segera memangkas suku bunga meskipun inflasi telah kembali ke target. Kehati-hatian ini beralasan masih ada ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak kembali, dan BI ingin memastikan bahwa tren penurunan inflasi benar-benar permanen sebelum mulai melonggarkan kebijakan. Baru pada paruh kedua tahun 2024, ketika inflasi secara konsisten tetap di bawah 3% dan risiko global mereda, BI mulai secara bertahap menurunkan Suku Bunga BI.

Kebijakan moneter BI tidak berdiri sendiri. Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah memainkan peran yang sama pentingnya dengan strategi yang berbeda namun saling melengkapi. Alih-alih membatasi pengeluaran seperti yang dilakukan kebijakan moneter, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar-besaran untuk secara langsung meredam

dampak inflasi terhadap masyarakat. Langkah paling signifikan adalah mempertahankan subsidi bahan bakar dan listrik meskipun ada tekanan fiskal yang sangat besar, total subsidi energi pada tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 502 triliun, hampir dua kali lipat dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awal (Kementerian Keuangan, 2023). Subsidi ini secara efektif berfungsi sebagai penyangga inflasi dengan menjaga harga bahan bakar di tingkat konsumen di bawah titik keseimbangan ekonominya.

Ketika tekanan fiskal menjadi tak tertahankan, pemerintah akhirnya menyesuaikan harga bahan bakar bersubsidi pada September 2022 yaitu harga Peralite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, namun langkah ini disertai dengan paket kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar (BLT BBM) senilai Rp 600.000 yang dibagikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Di sektor pangan, pemerintah memberlakukan larangan ekspor CPO selama April–Mei 2022 untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri, meskipun kebijakan ini menuai kritik karena merugikan petani kelapa sawit dan menyebabkan kerugian devisa. Operasi pasar beras dan stabilisasi harga melalui Bulog juga ditingkatkan untuk menjaga harga komoditas pangan pokok tetap terjangkau. Secara keseluruhan, kombinasi kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan fiskal protektif ini membuahkan hasil yang relatif baik : inflasi berhasil diturunkan kembali ke target BI pada pertengahan 2023, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di atas 5% yaitu salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 selama periode tersebut (IMF, 2023).

#### **4.6 Dampak terhadap Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi**

Inflasi bukan sekadar angka statistik, karena dampaknya dirasakan secara langsung oleh

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan kelompok berpenghasilan rendah. Inflasi di Indonesia pada tahun 2022 bersifat regresif, yang berarti semakin rendah pendapatan seseorang, semakin besar daya beli mereka tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini terjadi karena rumah tangga miskin menghabiskan porsi pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan pokok dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan menengah ke atas.

Data dari survei Susenas 2022 menunjukkan bahwa 40% rumah tangga terbawah mengalokasikan sekitar 56–60% pengeluaran mereka untuk makanan, sedangkan 20% rumah tangga teratas menghabiskan kurang dari 35%. Dengan inflasi pangan mencapai 8,01% pada tahun 2022, masyarakat miskin merasakan dampak terberat karena sulit bagi mereka untuk mengurangi konsumsi pangan. Akibatnya, banyak yang beralih ke makanan yang lebih murah dengan kualitas gizi yang lebih rendah atau mengurangi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan.

Tekanan terhadap daya beli juga terlihat jelas dalam beberapa indikator ekonomi. Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) untuk paruh kedua tahun 2022 turun menjadi rata-rata 121,4 dari 127,6 pada paruh pertama. Penurunan ini menandakan bahwa masyarakat memandang kondisi ekonomi dan pendapatan mereka semakin memburuk. Selain itu, pertumbuhan penjualan ritel juga melambat pada paruh kedua tahun 2022 karena inflasi mulai secara nyata mengikis daya beli masyarakat.

Meskipun inflasi tinggi, tingkat kemiskinan justru terus menurun dari 9,54% pada Maret 2022 menjadi 9,03% pada Maret 2023. Hal ini menunjukkan bahwa program perlindungan sosial pemerintah telah efektif dalam menjaga

daya beli kelompok rentan. Bantuan seperti BLT BBM, BLT Pangan, PKH, dan BPNT membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mencegah dampak inflasi terhadap kemiskinan menjadi lebih parah.

Bagi kelas menengah, dampak inflasi lebih terlihat dalam perubahan pola konsumsi. Banyak orang mulai beralih dari produk bermerek ke alternatif yang lebih murah, lebih sering memasak di rumah, dan mengurangi pembelian impulsif. Selain itu, kenaikan Suku Bunga BI telah menyebabkan kenaikan cicilan KPR dan kredit mobil, sehingga meningkatkan pengeluaran bulanan. Situasi ini juga berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan kredit konsumen dari akhir 2022 hingga awal 2023.

Pada tingkat makro, inflasi yang tinggi biasanya memicu risiko terjadinya spiral inflasi-upah, di mana kenaikan harga memicu tuntutan kenaikan upah, yang pada gilirannya kembali mendorong kenaikan harga. Namun, di Indonesia, risiko ini relatif rendah karena mayoritas angkatan kerja berada di sektor informal, Upah Minimum Provinsi (UMP) hanya disesuaikan sekali setahun, dan besarnya jumlah angkatan kerja membuat para pekerja tidak memiliki daya tawar yang kuat dalam negosiasi upah.

Stabilitas nilai tukar rupiah juga memengaruhi inflasi. Sepanjang tahun 2022, rupiah melemah sekitar 9% terhadap dolar AS, dari Rp14.300 menjadi sekitar Rp15.600. Depresiasi ini memperparah inflasi impor, karena Indonesia sangat bergantung pada impor untuk memenuhi banyak kebutuhan pangan dan energinya. Meskipun demikian, kenaikan Suku Bunga BI, intervensi BI di pasar valuta asing, dan ekspor komoditas yang kuat seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel membantu menjaga stabilitas rupiah.

Cadangan devisa yang melebihi USD130 miliar juga memperkuat kemampuan BI untuk mempertahankan nilai tukar.

Inflasi juga memengaruhi ekspektasi bisnis, terutama di kalangan UMKM. Ketidakpastian harga menyulitkan para pengusaha untuk menetapkan harga jual dan merencanakan produksi. Banyak UMKM akhirnya menanggung sebagian kenaikan biaya produksi untuk menghindari kehilangan pelanggan, sehingga margin laba mereka pun menyusut. Survei Kegiatan Usaha Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa tingkat utilisasi kapasitas industri, yang sempat pulih pada awal 2022, kembali menurun menjelang akhir tahun akibat kenaikan biaya bahan baku dan gangguan rantai pasokan.

Secara keseluruhan, Indonesia berhasil mengatasi tekanan inflasi pada tahun 2022 tanpa mengalami krisis besar seperti yang dialami beberapa negara berkembang lainnya, seperti Pakistan, Sri Lanka, dan Turki. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah dan BI yang terkoordinasi, ekspor komoditas yang kuat, serta perekonomian domestik yang masih didukung oleh konsumsi rumah tangga. Namun, pengalaman tahun 2022 menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan energi tetap menjadi kelemahan struktural yang perlu diatasi dalam jangka panjang.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan pokok. Pertama, konflik geopolitik global, terutama perang Rusia-Ukraina, memberikan dampak nyata dan terukur terhadap inflasi Indonesia 2022–2024, mendorong inflasi mencapai puncak 5,95% pada Q3 2022 — melampaui target BI dan tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Kedua, terdapat tiga jalur transmisi utama yang bekerja secara simultan dan saling memperkuat: (a) kenaikan harga energi dan

BBM sebagai kontributor terbesar dengan andil sekitar 32% dari total tekanan inflasi; (b) kenaikan harga pangan global, khususnya gandum dan minyak nabati, dengan transmisi yang terjadi dengan lag 3–6 bulan; dan (c) gangguan rantai pasok global yang memperkuat tekanan biaya dari sisi produsen.

Ketiga, inflasi 2022 Indonesia lebih bersifat cost-push daripada demand-pull, sebagaimana ditunjukkan oleh kontribusi dominan faktor-faktor sisi penawaran dalam dekomposisi inflasi. Implikasinya, penanganan melalui kebijakan moneter saja tidak cukup efisien karena tidak menyentuh akar permasalahan di sisi penawaran.

Keempat, respons kebijakan Bank Indonesia — dengan kenaikan BI Rate kumulatif 225 bps — terbukti efektif meredam laju inflasi yang kembali ke kisaran target pada pertengahan 2023, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan. Bauran kebijakan fiskal protektif (subsidi BBM dan bantuan sosial) terbukti menjadi bantalan penting bagi masyarakat rentan.

Kelima, inflasi yang tinggi berdampak signifikan pada penurunan daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah, meski program perlindungan sosial terarah berhasil meredam dampak terburuknya. Stabilitas makroekonomi Indonesia relatif terjaga berkat pengelolaan kebijakan yang responsif.

Keenam, penelitian ini mengkonfirmasi relevansi teori imported inflation dan cost-push inflation dalam menjelaskan dinamika inflasi Indonesia di era konflik geopolitik. Negara berkembang dengan ketergantungan impor komoditas tinggi memiliki kerentanan struktural terhadap guncangan geopolitik eksternal yang perlu dikelola melalui diversifikasi sumber impor, penguatan ketahanan pangan domestik, dan pengembangan energi terbarukan dalam jangka menengah-panjang.

## REFERENSI

- Asteriou, D., Pilbeam, K., & Pratiwi, C. E. (2023). The impact of the Russia-Ukraine war on European inflation. *Journal of International Money and Finance*, 134, 102834.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2022*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Berita Resmi Statistik: Inflasi Desember 2024*. BPS RI.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2022*. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2023: Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Momentum Pemulihan Ekonomi*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III 2024*. Bank Indonesia.
- Blanchard, O., & Gali, J. (2007). The Macroeconomic Effects of Oil Shocks: Why are the 2000s so different from the 1970s? NBER Working Paper No. 13368. National Bureau of Economic Research.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Farhi, E., & Gabaix, X. (2016). Rare disasters and exchange rates. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(1), 1–52.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2022). *The Importance of Ukraine and the Russian Federation for Global Agricultural Markets and the Risks Associated with the War in Ukraine*. FAO Information Note.
- Firdaus, M., & Wahyudi, S. (2022). Pengaruh harga minyak dunia terhadap inflasi di Indonesia: Pendekatan Vector Autoregression. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45–58.
- Hossain, A. A. (2023). Inflation and monetary policy in developing economies: Revisiting the evidence. *Journal of Macroeconomics*, 75, 103489.
- Hummels, D., Ishise, H., & Kiyotaki, N. (2022). International supply chain disruptions: Evidence and implications. *Journal of International Economics*, 138, 103653.
- International Monetary Fund (IMF). (2022). *World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery*. IMF.
- International Monetary Fund (IMF). (2023). *World Economic Outlook: A Rocky Recovery*. IMF.
- International Monetary Fund (IMF). (2024). *World Economic Outlook: Steady but Slow: Resilience amid Divergence*. IMF.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2022). *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2022*. Kementerian ESDM RI.

- Ozili, P. K., & Obiora, K. (2023). Geopolitical risk and inflation in the post-COVID era. *International Journal of Finance & Economics*, 28(4), 4185–4198.
- Surjaningsih, N., Yanuarti, T., & Depari, G. A. (2023). Transmisi harga pangan global ke inflasi domestik Indonesia: Analisis Vector Error Correction Model. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 26(1), 1–24.
- World Bank. (2022). *Commodity Markets Outlook: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets*. World Bank Group.
- World Bank. (2023). *Global Economic Prospects January 2023*. World Bank.